



Rencana Kerja **Tahunan**

2024



Pelabuhan Perikanan Nusantara
Pengembangan

KATA PENGANTAR

Sebagai tindak lanjut telah dilakukan revisi pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan RKA-KL Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan Tahun Anggaran 2024, maka di anggap perlu untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2024. Penyusunan RKT PPN Pengembangan tahun 2024 ini untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pencapaian kinerja dari sasaran (target) masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan, baik dari segi fisik maupun segi pembiayaan pada PPN Pengembangan.

Kami berharap dengan telah disusunnya Revisi RKT PPN Pengembangan Tahun 2024 akan dapat diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit kerja lingkup kinerja PPN Pengembangan di masa yang akan datang. Berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan kinerja di PPN Pengembangan.

Jembrana, 15 Januari 2024

Kepala Pelabuhan



Andi Mannojengi

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	2
BAB 2 PERENCANAAN STRATEGIS	3
2.1 Visi dan Misi	3
2.2 Sasaran Strategis.....	3
BAB 3 RENCANA KINERJA	6
3.1 Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	6
3.2 Rencana Aksi	8
BAB 4 PENUTUP	13

Daftar Tabel

Tabel 0-1Target Kinerja PPN Pengambengan Tahun 2024	6
Tabel 0-2Anggaran PPN Pengambengan Tahun 2024	7
Tabel 0-3Rencana Aksi.....	8
Tabel 0-4Dukungan Anggaran dari RKAKL	11

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana terpadu dan berkesinambungan. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005- 2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun Rencana Strategis KKP 2020-2024 sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappanes Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L. Setelah Renstra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk itu setiap unit utama yang mengampu program pembangunan perikanan dan setiap satuan kerja yang mengampu kegiatan pembangunan perikanan, perlu menyusun Rencana Aksi Program atau Rencana Aksi Kegiatan.

Selanjutnya berpedoman pada Rencana Aksi Program DJPT maka PPN Pengambengan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh unit utama, dan akan dilaksanakan oleh PPN Pengambengan melalui kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024.

1.2 Tujuan

Tujuan disusun Rencana Kerja Tahunan PPN Pengambengan Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai acuan dan arahan dalam dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis pada program pengelolaan perikanan tangkap, mulai dari penyusunan kebijakan, rencana strategis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program/kegiatan pada tahun 2024.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan PPN Pengambengan pada tahun 2024.
3. Sebagai dokumen pendukung dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020-2024
7. Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

BAB 2

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut:

“Terwujudnya Pembangunan Perikanan Tangkap yang Berdaulat, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Nelayan” dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Berdaulat** diartikan sebagai kemampuan penuh untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan untuk digunakan sebesar-besarnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi dari kegiatan perikanan tangkap.
2. **Mandiri** diartikan sebagai keadaan untuk dapat berdiri sendiri tanpa bergantung dengan pihak lain dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. **Berdaya saing** diartikan sebagai keunggulan dan kapasitas yang dimiliki untuk menghadapi persaingan dalam peta kompetisi global dalam pengelolaan sumber daya perikanan.
4. **Berkelanjutan** dimaksudkan sebagai upaya untuk mengelola dan melindungi sumber daya ikan agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh generasi saat ini dan generasi mendatang.
5. **Kesejahteraan** diartikan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, khususnya nelayan.

2.2 Sasaran Strategis

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan serta

merupakan penjabaran dari misi pembangunan nasional. Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Turut serta dalam mewujudkan kedaulatan di laut dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai strategis secara sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan dan keamanan;
2. Mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan;
3. Meningkatkan kapasitas dan daya saing dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya ikan;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Untuk tahun 2024 ada beberapa sasaran kegiatan yang akan dikerjakan serta ditargetkan untuk memenuhi dalam pengukuran dan penilaian kinerjanya PPN Pengambengan.

Adapun sasaran kegiatan yang dimaksud adalah :

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengambengan dengan indikator kinerjanya adalah Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Pengambengan (Rp juta)
2. Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengambengan meningkat dengan indikator kinerjanya adalah volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan (ton)
3. Pengelolaan PPN Pengambengan yang berdaya saing dengan indikator kinerjanya adalah :
 - a) Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengambengan (Persen)
 - b) Tingkat Kinerja PPN Pengambengan (Nilai)
 - c) Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)
4. Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Pengambengan yang optimal dengan indicator kinerja berupa :

- a) Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
 - b) Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
5. Pengelolaan Kapal Perikanan Dan Alat Penangkapan Ikan Yang Berdaya Saing di PPN Pengembangan dengan indikator kinerja berupa Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)
6. Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/ Terlindungi di PPN Pengembangan dengan indicator kegiatan adalah Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)
7. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan dengan indikator kegiatan yaitu
- a) Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
 - b) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
 - c) Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
 - d) Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)
 - e) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
 - f) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
 - g) Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
 - h) Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
 - i) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)

BAB 3

RENCANA KINERJA

3.1 Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

Berdasarkan Rencana Kerja PPN Pengembangan tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024, maka target kinerja dan anggaran PPN Pengembangan adalah sebagai berikut (Tabel 1).

Tabel 3-1 Target Kinerja PPN Pengembangan Tahun 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di PPN Pengembangan	1	Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Rp Juta)	760,971
2	Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengembangan meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan (Ton)	14479
3	Pengelolaan PPN Pengembangan yang berdaya saing	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)	100
		4	Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)	84
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	84
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Pengembangan yang optimal	6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	10,31
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	30,1
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Pengembangan	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	1043
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di PPN Pengembangan	9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)	25
7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan	10	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	45,10
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	80
		12	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	94
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)	84
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	80
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	80
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	93,76
		17	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	86

	18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)	88,30
--	----	--	-------

Tabel 3-2 Anggaran PPN Pengembangan Tahun 2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN
ANGGARAN TAHUN 2024				15.094.595.000,00
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			3.517.716.000,00
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan			38.000.000,00
2337.ACA	Perizinan Produk	40	Produk, Keputusan	25.000.000,00
2337.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	33	ORANG	13.000.000,00
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan			3.388.402.000,00
2338.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	1	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	150.000.000,00
2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	2	LEMBAGA	1.750.402.000,00
2338.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	1	UNIT	75.000.000,00
2338.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	2	UNIT	1.413.000.000,00
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan			8.000.000,00
2339.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	40	ORANG	8.000.000,00
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan			83.314.000,00
2341.QKB	Pemantauan produk	300	LAPORAN	83.314.000,00
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen			11.576.879.000,00
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap			11.576.879.000,00
2342.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	UNIT	168.856.000,00
2342.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	10.953.376.000,00
2342.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Unit, m2, Paket	160.507.000,00
2342.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1	Orang, Layanan, Rekomendasi	55.000.000,00
2342.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	239.140.000,00

3.2 Rencana Aksi

Tabel 3-3 Rencana Aksi

NO	IKU	TARGET 2024	NAMA KEGIATAN
1	Penerimaan PNBPNon SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Rp Juta)	760,971 Juta	Pelayanan Pengusahaan pelabuhan perikanan; Sosialisasi pengusahaan (penggunaan SIJAKA DAN SIPAUS); Evaluasi pengusahaan Pelabuhan Perikanan
2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan (Ton)	14.479 Ton	Pengelolaan dan Operasional Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan; Desiminasi Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dan Penerapan Lembar Awal di Pelabuhan Perikanan; Pelaksanaan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Pelabuhan Perikanan; Sosialisasi CPIB; Bimtek CPIB di wilayah binaan; Inspeksi Pengendalian Mutu
3	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengambengan (Persen)	100%	Evaluasi pengusahaan Pelabuhan Perikanan
4	Tingkat Kinerja PPN Pengambengan (Nilai)	84	Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan; Pelaksanaan kegiatan PIPP di pelabuhan perikanan;Rapat Evaluasi Kinerja Operasional di pelabuhan;Rapat Koordinasi Pelaksanaan Enumerasi Dalam Rangka Mendukung PNBPNasca Produksi di pelabuhan binaan; Pendataan produksi perikanan tangkap/IOTC di pelabuhan Benoa;

5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	100%	Tata Kelola dan Operasional Kesyahbandaran;Diseminasi Regulasi Kesyahbandaran dan Aplikasi Teman SPB Di Pelabuhan Perikanan dalam rangka mendukung PNBP Pasca produksi dan Penangkapan Ikan Terukur (PIT);Operasional Kesyahbandaran di wilayah Binaan dalam rangka mendukung PNBP Pasca produksi dan Penangkapan Ikan Terukur (PIT);Operasional Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sesuai SK.Dirjen dalam rangka mendukung PNBP Pasca produksi dan Penangkapan Ikan Terukur (PIT);Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kesyahbandaran Dalam Rangka dalam rangka mendukung PNBP Pasca produksi dan Penangkapan Ikan Terukur (PIT);Patroli Perairan WKOPP di Pelabuhan Perikanan;Rapat evaluasi Pelaksanaan/operasional PSM di Pelabuhan Perikanan;Operasional Port State Measure (PSM) di Pelabuhan Perikanan
6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	10,31%	Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan
7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	30,1	Audit Sertifikasi ISO 140001:2015 di Pelabuhan Perikanan;Pengelolaan Lingkungan Di Pelabuhan Perikanan
8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	1.043 Kapal	Sosialisasi Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaikan/Pengukuran/Pengujian/Inspeksi Kapal Perikanan
9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)	25%	Bimbingan Teknis Untuk Peningkatan Kompetensi awak Kapal Perikanan/Nelayan
10	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	45,1	Pelaksanaan WBK di Pelabuhan Perikanan
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	80%	Menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi)
12	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	94	Pengisian LKE Rekonsiliasi Kinerja
13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)	84	Monitoring dan Evaluasi kinerja dan penerapan disiplin pegawai;Penguatan integritas dan substansi teknis bagi PNS Pengangkatan Tahun 2023

14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Persen)	80%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan data Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis 2. Pelaksanaan Perencanaan dan Persiapan Pengadaan 3. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE 4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan 5. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa setiap bulan 6. Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2024
15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Persen)	80%	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kesesuaian Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 2) Menyampaikan usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan 1 tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang 3) Penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) periode Tahun 2018 – 2019 yang diselesaikan di Tahun 2023 4) Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian 5) Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu
16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Nilai)	93,76	Pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
17	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Nilai)	86	
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Indeks)	88,3	Forum Konsultasi Publik Dan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas

Tabel 3-4Dukungan Anggaran dari RKAKL

NO	IKU	TARGET 2024	ANGGARAN	NAMA KEGIATAN
1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Rp Juta)	760,971	146.410.000	Pelayanan Pengusahaan pelabuhan perikanan
			12.160.000	Sosialisasi pengusahaan (penggunaan SIJAKA DAN SIPAUS)
			3.247.000	Tata laksana Operasional Pelayanan Usaha
2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan (Ton)	14.479	110.741.000	Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan
			309.463.000	Pelaksanaan tata kelola dan operasional cara penanganan ikan yang baik (CPIB) dan Inspeksi Pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan
3	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengambengan (Persen)	100	10.380.000	Evaluasi PNBP dan Kepatuhan Kegiatan Usaha Di Pelabuhan Perikanan
4	Tingkat Kinerja PPN Pengambengan (Nilai)	84	215.700.000	Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan
5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)	100	502.208.000	Pelaksanaan Tata kelola dan Operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan
6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)	10,31	1.000.000.000	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasillitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur
7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)	30,1	24.800.000	Pengelolaan Lingkungan Di Pelabuhan Perikanan
8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	1043	24.900.000	Pendukung layanan publik bidang kapal perikanan
9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)	25	13.100.000	Fasilitasi dan pembinaan peningkatan pengetahuan/kompetensi nelayan
10	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)	45,1	34.000.000	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)	80	105.500.000	Pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

12	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	94	39.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran
13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)	84	55.000.000	Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional
14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	80	14.960.000	Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa
15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	80	2.160.000	Pengelolaan Penyimpan BMN
16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	93,76	35.560.000	Laporan program dan kegiatan
17	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	86	54.720.000	Laporan program dan keuangan
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)	88,3	14.230.000	Pengukuran Tingkat Pelayanan Usaha di Pelabuhan Perikanan (IKM)

BAB 4

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang disusun berdasarkan dokumen rencana strategis untuk meningkatkan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan yang terstandar. Rencana Kerja Tahunan ini memuat semua program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, baik yang bersifat strategis maupun yang bersifat rutin.

Dengan adanya Rencana Kerja Tahunan ini Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan akan lebih mudah melaksanakan manajemen program/kegiatan, implementasi, monitoring dan evaluasi yang baik, terstruktur dan terukur sehingga memudahkan dalam melaksanakan seluruh kegiatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan.